

# STRATEGI REHABILITASI HUTAN LINDUNG DI KABUPATEN GARUT

## *(Rehabilitation Strategy of Protection Forest in Garut District)*

Oleh / By :  
Dian Diniyati, Eva Fauziyah & Tri Sulistiyati W.

### ABSTRACT

*Protection forests in Garut District have been seriously degraded. Occupation of forest is one of the cause of deforestation. Forest area has been converted into farming areas with vegetables as the main vegetation. There have been some attempts conducted to control it, by involving many related stakeholders, but the satisfactory results were not obtained yet. In relation to that conditions, strategy favourable to local condition, based on stakeholders point of view, is needed. This study aims to know stakeholders perspectives about the condition of protection forest and to formulate corresponding alternative rehabilitation strategy. Data were collected by questioners and dept interview. The data then, were analyzed by Analytical Hierarchy Process (AHP) and descriptive methods. The result showed that the main priority in the rehabilitation of protection forests in Garut District is the development of haramay (0,456), and the appropriate strategy for the implementation are as follows: partnership pattern (0,399), socialization of haramay (0,340), and giving capital for investment (0,20).*

*Keywords : Protection forest, degradation, rehabilitation, stakeholders*

### ABSTRAK

Degradasi hutan lindung di Kabupaten Garut sudah cukup parah, salah satunya disebabkan oleh perambahan hutan dengan mengkonversi menjadi lahan pertanian dengan tanaman utama sayuran. Sudah banyak program yang dilakukan untuk mengembalikan fungsi hutan lindung serta mengurangi perambahan, dan penanganannya sudah melibatkan *stakeholders*, namun masih dijumpai banyak kendala dalam pelaksanaannya sehingga keberhasilannya masih jauh dari yang diharapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan strategi yang sesuai dengan kondisi dan situasi setempat berdasarkan pandangan *stakeholders*. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui pandangan *stakeholders* mengenai kondisi hutan lindung dan merumuskan alternatif strategi rehabilitasinya. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuisisioner dan wawancara mendalam, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan haramay (0,456) merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan lindung di Kabupaten Garut dan alternatif strategi yang dapat dilakukan adalah melalui: pola kemitraan (0,399), sosialisasi haramay (0,340), dan pemberian bantuan modal (0,20).

Kata kunci : hutan lindung, kerusakan, rehabilitasi, stakeholders

---

<sup>1</sup>Staf Peneliti pada Balai Penelitian Kehutanan Ciamis

## I. PENDAHULUAN

Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten yang berada di propinsi Jawa Barat yang mempunyai kondisi topografi yang berbukit-bukit dan pegunungan. Menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat, dengan kondisi topografi yang berbukit-bukit dan pegunungan, maka seharusnya 80% luas wilayah Kabupaten Garut ditetapkan sebagai kawasan lindung.

Hasil penelitian Ramdan dan Yayan (2003) mengenai penetapan prioritas pelaksanaan 10 urusan kehutanan pada tingkat kabupaten di DAS Cimanuk menggunakan metode AHP diketahui bahwa prioritas utama urusan kehutanan di DAS Cimanuk adalah pengelolaan hutan lindung. Kawasan hutan lindung di DAS Cimanuk sudah mengalami degradasi dengan banyaknya pengolahan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung lahan seperti: wilayah yang topografinya curam yang seharusnya lebih banyak tanaman keras namun justru pada lahan tersebut banyak yang ditanami dengan tanaman sayuran, dimana kerusakan di hutan lindung lebih tinggi dibandingkan dengan kerusakan hutan produksi. Laju kerusakan hutan lindung dari tahun 1997 sampai 2002 adalah sebesar 10 persen pertahun, sedangkan hutan produksi sebesar 5 persen per tahun (Badan Planologi, 2002 *dalam* Ginoga, *et.al.* 2005). Lebih jauh Ginoga, *et.al.* (2005) mengatakan bahwa penebangan liar dan konversi lahan merupakan penyebab utama kerusakan.

Kondisi hutan lindung di Kabupaten Garut pada saat ini mengalami gangguan yang mengancam kelestariannya, rusaknya hutan lindung menimbulkan kerugian baik ekonomis maupun sosial dan ekologis. Upaya rehabilitasi yang dilakukan saat ini sudah melibatkan masyarakat sekitar, tetapi masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya sehingga keberhasilannya masih jauh dari yang diharapkan. Padahal jika upaya rehabilitasi dapat berhasil bukan saja dapat mengatasi kerusakan hutan lindung tersebut namun lebih jauh dapat memberikan kontribusi ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar hutan, sehingga akhirnya dapat tercipta pola pengelolaan hutan lindung yang partisipatif.

Untuk itulah perlu dilakukan suatu kajian mengenai Strategi Rehabilitasi Hutan Lindung di Garut yang partisipatif berdasarkan persepsi serta pendapat *stakeholders*, sehingga dapat diketahui pendapat para *stakeholders* mengenai kondisi hutan lindung di Kabupaten Garut, serta dirumuskan alternatif strategi rehabilitasinya yang hasilnya dapat diaplikasikan dilapangan.

Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas mengenai pendapat para *stakeholders* menggunakan metode AHP, mengenai upaya rehabilitasi hutan lindung yang melibatkan masyarakat setempat dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi.

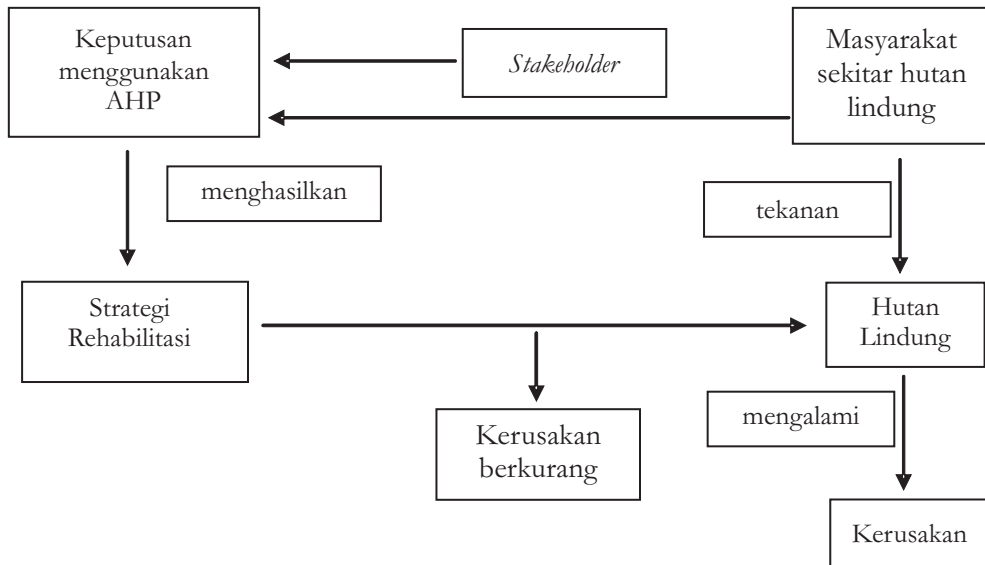
## II. METODOLOGI

### A. Kerangka Pemikiran

Pada saat sekarang ini hutan lindung di Kabupaten Garut sudah mengalami kerusakan yang disebabkan karena adanya tekanan yang tinggi dari masyarakat sekitar. Hal ini terjadi karena kondisi masyarakat tergolong miskin dan tidak mempunyai lahan. Meskipun sudah banyak program yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan reboisasi hutan lindung, namun kenyataannya hutan lindung terus mengalami kerusakan. Program-program tersebut telah dilaksanakan

dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan lindung. Kegagalan ini salah satunya diduga disebabkan oleh kurang sesuainya kebijakan/ keputusan yang dilaksanakan atau diterapkan di lokasi tersebut dengan keinginan masyarakat.

Untuk itulah diperlukan suatu metode pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan sesuai dengan persepsi para *stakeholders* menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Seperti dikemukakan oleh Ramdan dan Yayan (2003), proses pengambilan keputusan pada dasarnya adalah memilih suatu alternatif dimana hasil keputusan dapat merupakan pernyataan yang disetujui antar alternatif untuk mencapai tujuan. Proses Hirarki Analisis adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan hirarki suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan ke dalam kelompok-kelompok, kemudian kelompok-kelompok tersebut diatur menjadi satu bentuk hirarki. Diharapkan dengan metode ini dihasilkan suatu alternatif strategi rehabilitasi hutan lindung yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Kerangka pemikiran penelitian seperti terlihat pada Gambar 1.

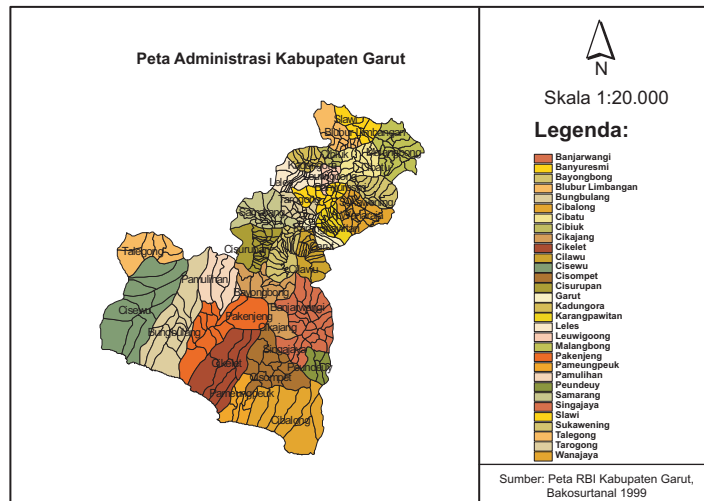


Gambar 1. Alur Pemikiran Strategi Rehabilitasi Hutan Lindung di Kabupaten Garut Menggunakan AHP

## B. Lokasi dan Waktu

Penelitian dilakukan di Kabupaten Garut yang kajiannya difokuskan pada hutan lindung dan dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2006.

Secara geografis Kabupaten Garut terletak pada  $6^{\circ} 57' 34'' - 7^{\circ} 44' 57''$  Lintang Selatan dan  $107^{\circ} 24' 3'' - 108^{\circ} 24' 34''$  Bujur Timur. Kabupaten Garut mempunyai luas wilayah sekitar  $3.066.88 \text{ Km}^2$  (107.852 ha) dengan daerah utara, timur, dan barat secara umum berupa daerah dataran tinggi dengan kondisi berbukit-bukit dan pegunungan. Peta administrasi Kabupaten Garut seperti tercantum pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Garut

## C. Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui pengamatan lapangan (*survey* dan observasi) dan wawancara mendalam terhadap para pakar yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menganalisa data-data yang terkait dengan hutan lindung di Kabupaten Garut yang diperoleh dari berbagai instansi maupun lembaga swasta seperti dinas kehutanan, perusahaan swasta, LSM dan lain-lain.

Prosedur penelitian dan pengumpulan data meliputi :

1. Pengamatan lapangan kondisi dan pengelolaan hutan lindung di Garut.
2. Pengisian kuisioner yang dibuat berdasarkan kaidah AHP, dimana pertanyaannya secara keseluruhan terkait dengan hutan lindung di Garut seperti: pengelolaan hutan lindung, permasalahan yang ada, dan alternatif strategi dalam mengatasi permasalahan tersebut.
3. Wawancara secara mendalam dengan para pakar terpilih yang dianggap mengetahui dan memahami kondisi dan permasalahan hutan lindung di Garut, serta kebijakan-kebijakan yang mungkin diterapkan untuk mengatasi masalah yang ada. Wawancara ini diantaranya dilakukan terhadap Kepala Dinas Kehutanan, Administratur Perhutani KPH Garut,

Pengusaha Haramay, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Ketua kelompok tani dengan jumlah responden yang terpilih sebanyak 13 (tiga belas) orang.

#### D. Analisis Data

Pandangan/pendapat para *stakeholders* terhadap bobot kepentingan terhadap masalah hutan lindung di Garut dihitung dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Menurut Saaty (1993), metode ini mampu memecahkan permasalahan yang terstruktur maupun kompleks (tidak terstruktur) dengan data atau informasi yang terbatas dengan membangun hirarki sistem yang kompleks menjadi elemen-elemen pokok menurut hubungan yang esensial.

Elemen-elemen penyusun hirarki ditentukan berdasarkan data sekunder dan wawancara *stakeholders*. Pemberian bobot kepentingan dilakukan dengan membandingkan masing-masing elemen yang sudah ditentukan secara berpasangan dengan menggunakan skala komparasi seperti disajikan pada Tabel 1. Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner (pemberian bobot kepentingan) dianalisa secara kualitatif dan kuantitatif. Alternatif strategi pengelolaan hutan lindung yang dirumuskan mengacu pada pandangan *stakeholder* terhadap masing-masing elemen penting dalam pengelolaan hutan lindung serta permasalahan pengelolaan hutan yang dihadapi.

Tabel 1. Skala Perbandingan Berpasangan

Skala / tingkat kepentingan	Definisi	Penjelasan
1	Kedua elemen sama pentingnya	Dua elemen penyumbang sama kuat pada sifatnya
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting ketimbang lainnya	Pengalaman dan pertimbangan sedikit menyokong satu elemen atas elemen lainnya
5	Elemen yang satu esensial atau sangat penting dari elemen lainnya	Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat menyokong satu elemen atas elemen lainnya
7	Satu elemen jelas lebih penting dari elemen lainnya	Satu elemen dengan kuat disokong dan dominasinya telah terlihat dalam praktek
9	Satu elemen mutlak lebih penting ketimbang lainnya	Bukti yang menyokong elemen yang satu memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkannya
2,4,6,8	Nilai-nilai di antara 2 pertimbangan	Kompromi diperlukan di antara 2 pertimbangan
Kebalikan (1/2,1/3....dst)	Jika untuk aktivitas i mendapat suatu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya dengan i.	

Sumber: Saaty (1993)

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebagian besar kondisi alam Kabupaten Garut memiliki permukaan tanah dengan kemiringan curam dan sangat curam (77,06 %) dengan ketinggian antara 0 dan 1000 mdpl (Anonim, 2004). Kabupaten Garut memiliki iklim tropis dengan curah hujan cukup tinggi dimana sebagian kabupaten ini termasuk pada DAS Cimanuk. Penggunaan lahan di Kabupaten Garut seperti tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Penggunaan Lahan di Kabupaten Garut Tahun 2004

No.	Rincian	Luas (Ha)	Persentase (%)
I.	Sawah	49.476	16,14
II.	Darat		
2.1.	Pemukiman/Perkampungan	12.312	4,02
2.2.	Industri	-	-
2.3.	Pertambangan	-	-
2.4.	Tanah Kering Semusim/Tegalan	52.348	17,08
2.5.	Kebun dan Kebun Campuran	59.986	19,57
2.6.	Perkebunan	26.825	8,75
2.7.	Hutan	72.080	23,52
2.8.	Alang-alang/Padang Semak Belukar	32.043	10,45
2.9.	Tanah Rusak Tandus	-	-
1.10.	Tanah Kosong	7	0,00
III.	Penggunaan Lain	2.722	0,89
	Jumlah	306.519	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Garut, 2004

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Garut didominasi oleh hutan (23,52%) dan kebun/kebun campuran (19,57%), dan tanah kering semusim/tegalan (17,08%). Untuk jenis penggunaan lahan sebagian besar adalah hutan yang mempunyai fungsi hutan lindung. Dengan demikian tata ruang di Kabupaten Garut belum memenuhi rencana tata ruang yang di atur dengan Perda No. 2 tahun 2003.

#### B. Pandangan Stakeholder Terhadap Hutan Lindung di Garut

Rencana Pola Tata Ruang Kawasan Lindung Jawa Barat sesuai dengan Perda No 2 tahun 2003 sebagai berikut:

- Menetapkan kawasan lindung sebesar 45% dari luas wilayah Jawa Barat yang meliputi kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.
- Mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidroorologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan
- Mengendalikan pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

Perda tersebut juga menjelaskan bahwa komposisi kawasan lindung adalah 19% di dalam kawasan hutan dan 26% di luar kawasan hutan. Proporsi 45% kawasan lindung tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan luas yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing. Maka dengan demikian wilayah Kabupaten Garut seharusnya 80% luas wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan lindung seperti yang dijelaskan pada pendahuluan.

Namun berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Garut Tahun 2001 maka strategi pemanfaatan ruang Kabupaten Garut meliputi strategi pemantapan kawasan lindung, pengembangan kawasan budidaya, pengembangan sistem prasarana untuk wilayah, serta pengembangan kawasan-kawasan tertentu.

Pemanfaatan ruang Kabupaten Garut berdasarkan fungsi utamanya secara makro terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dari hasil perhitungan maka rencana pemanfaatan ruang kawasan lindung tahun 2011 yang terdiri dari kawasan perlindungan kawasan bawahnya, hutan produksi berfungsi lindung, kawasan suaka alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana dan kawasan perlindungan setempat seluas 131.952,47 Ha (43,00%). Sedangkan rencana pengembangan kawasan budidaya tahun 2011 yang terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian seluas 174.566,53 Ha (56,96%).

Melihat situasi yang demikian, terdapat perbedaan persepsi mengenai arti dan makna hutan lindung, sehingga masing-masing *stakeholders* memiliki pandangan yang berbeda. Padahal ini sangat berhubungan dengan pembuatan suatu kebijakan mengenai pengelolaan hutan lindung. Pandangan *stakeholders* terhadap Hutan Lindung di Kabupaten Garut ditunjukkan oleh Tabel 3.

Tabel 3. Pandangan *Stakeholders* Terhadap Hutan Lindung di Kabupaten Garut

No.	Pernyataan	Jawaban/Pendapat (Persentase)					N (Jumlah)
		Sbi	Bi	N/Bs	Br	SBr	
1.	Bagaimana pendapat Anda tentang kondisi Hutan Lindung di Garut pada saat ini?	-	-	2 (15,4%)	9 (69,2%)	2 (15,4%)	13 (100%)
2.	Dilihat dari kontribusi terhadap upaya mereboisasi lahan di hutan lindung, bagaimana peranan beberapa <i>stakeholders</i> berikut ini:	2 (15,4%)	7 (53,8%)	4 (30,8%)	-	-	13 (100%)
	a. Pemerintah pusat	2 (15,4%)	6 (46,2%)	4 (30,8%)	1 (7,6%)	-	13 (100%)
	b. Pemerintah daerah	2 (15,4%)	3 (23,1%)	8 (61,5%)	-	-	13 (100%)
	c. Masyarakat sekitar hutan	2 (15,4%)	10 (76,9%)	1 (7,7%)	-	-	13 (100%)
	d. Lembaga swadaya masyarakat	2 (15,4%)	6 (46,2%)	5 (38,4%)	-	-	13 (100%)
	e. Pengusaha	2 (15,4%)	6 (46,2%)	5 (38,4%)	-	-	13 (100%)

No.	Pernyataan	Jawaban/Pendapat (Persentase)					N (Jumlah)
		Sbi	Bi	N/Bs	Br	SBr	
3.	Bagaimana pendapat Anda tentang kondisi jenis tanaman yang ada di lahan hutan lindung pada saat ini?	2 (15,4%)	4 (30,8%)	6 (46,2%)	-	-	13 (100%)
4.	Bagaimana tingkat keamanan kawasan hutan?	-	-	3 (23,1%)	10 (76,9%)	-	13 (100%)
5.	Bagaimana sosialisasi program reboisasi hutan lindung terhadap masyarakat di sekitarnya?	-	6 (46,2%)	7 (53,8%)	-	-	13 (100%)
6.	Seberapa jauh pengetahuan masyarakat terhadap sanksi bagi perambah hutan?	-	5 (38,4%)	2 (15,4%)	6 (46,2%)	-	13 (100%)
7.	Bagaimana manfaat jasa hutan lindung dirasakan oleh masyarakat sekitar hutan?	2 (15,4%)	5 (38,4%)	3 (23,1%)	3 (23,1%)	-	13 (100%)
8.	Bagaimana tingkat ketergantungan masyarakat sekitar hutan terhadap hutan lindung ?	3 (23,1%)	3 (23,1%)	6 (46,2%)	1 (7,6%)	-	13 (100%)
9.	Upaya peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat di sekitar hutan lindung	3 (23,1%)	7 (53,8%)	3 (23,1%)	-	-	13 (100%)
10.	Upaya peningkatan kualitas SDM agar terbentuk kemandirian pada masyarakat sekitar hutan	-	5 (38,4%)	6 (46,2%)	2 (15,4%)	-	13 (100%)

Keterangan: Sbi = Sangat Baik, Bi = Baik, N/ BS = Normal/ Biasa-biasa Saja, Br = Buruk, SBr = Sangat Buruk

Pernyataan pertama mengenai kondisi hutan lindung di Kabupaten Garut pada saat ini ternyata 9 orang (69,2%) menyatakan bahwa kondisinya sudah rusak bahkan ada 2 orang (15,4%) mengakui bahwa kondisinya sudah sangat buruk sekali walaupun ada juga dua orang responden berpendapat bahwa kondisinya biasa saja. Namun sebagian besar responden menyatakan buruk, hal ini mengisyaratkan bahwa pada dasarnya *stakeholders* mengetahui dan menyadari bahwa kondisi hutan lindung sudah rusak dan memerlukan rehabilitasi/reboisasi. Penilaian responden terhadap peranan semua *stakeholders* dalam rehabilitasi/reboisasi berkisar dari sangat baik sampai normal. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua *stakeholders* telah berperan aktif melakukan upaya reboisasi lahan di hutan lindung, walaupun kenyataannya sampai sekarang kondisi hutan lindungnya masih rusak. Kondisi ini dapat



dijadikan sebagai *starting point* yang baik dimana responden sudah mengetahui kondisi hutan lindung yang rusak dan ada kesadaran untuk segera merehabilitasi/mereboisasinya.

Pernyataan tentang kondisi tanaman yang ada serta tingkat keamanan di hutan lindung saling berhubungan, dimana responden menjawab kalau kondisi tanaman sangat baik sampai biasa saja hal ini menunjukkan bahwa kondisi tanaman di hutan lindung normal sebagaimana seharusnya hutan lindung. Namun pada saat pertanyaan mengenai tingkat keamanan terlihat bahwa jawabannya adalah normal sampai buruk, ini menunjukkan bahwa hutan lindung sudah mulai rawan karena adanya pengrusakan.

Pernyataan yang berhubungan dengan sosialisasi reboisasi dan pengetahuan mengenai sanksi menunjukkan jawaban responden mulai dari normal sampai buruk. Hal ini memperlihatkan bahwa program sosialisasi reboisasi sudah dilakukan. Namun, sosialisasi mengenai sanksi bagi perusak hutan lindung masih dirasakan kurang. Padahal, penilaian responden mengenai jasa dan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan lindung adalah biasa sampai buruk. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat tergantung kepada hutan lindung. Namun karena pengetahuan yang terbatas, maka pemanfaatannya dilakukan dengan kurang bijaksana ditambah lagi dengan kurangnya sosialisasi mengenai kondisi dan manfaat hutan lindung sehingga hutan lindung mempunyai tingkat kerawanan yang mengancam kelestariannya. Pemanfaatan hutan lindung oleh masyarakat yang kurang bijaksananya juga dipicu oleh tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, walaupun pendapat mengenai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan lindung adalah baik sekali sampai normal, akan tetapi upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dinilai biasa sampai buruk.

### C. Alternatif Strategi Pemecahan Masalah

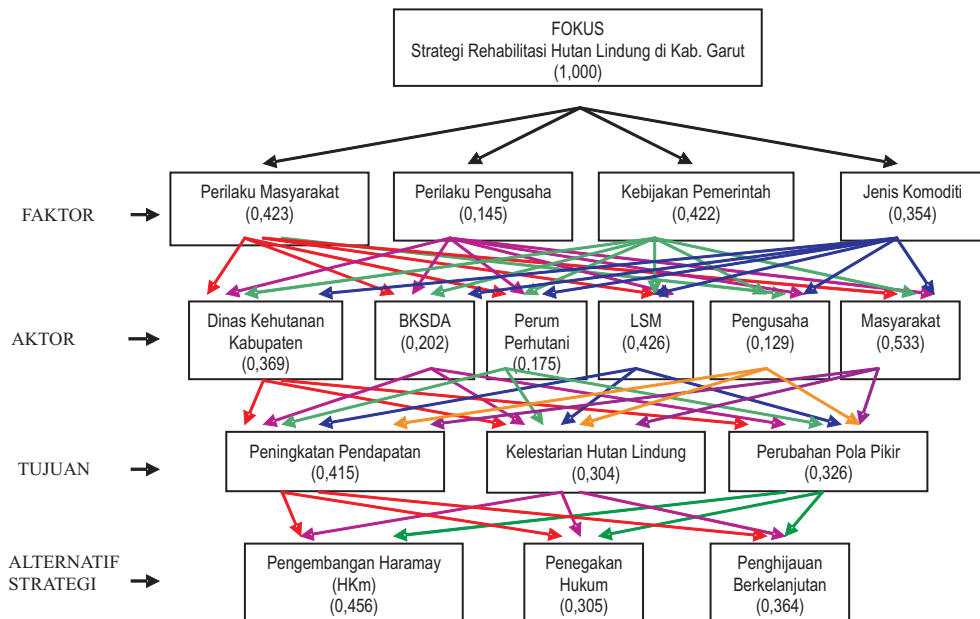
Kondisi hutan lindung di Kabupaten Garut pada saat ini sangat mengkhawatirkan, disebabkan oleh perambahan yang merubah fungsi hutan menjadi lahan pertanian (tanaman sayuran). Padahal berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/2003 tentang penunjukan kawasan hutan di Jawa diketahui bahwa hutan produksi yang dikelola oleh Perhutani berubah fungsinya menjadi Hutan Lindung, sedangkan untuk pengamanan kawasan mengacu kepada surat Gubernur Jawa Barat pada tanggal 20 Mei 2003 No: 522/1224/Binprod perihal perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dimana operasi wanalaga dilakukan untuk menurunkan para perambah dari kawasan hutan.

Para *stakeholders* yang berkepentingan dengan hal tersebut menyepakati dibentuknya forum PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) supaya para perambah dapat diberdayakan. PHBM yang sudah berlangsung meliputi semua jenis tanaman seperti tanaman rumput gajah (*Pennisetum purpureum*), kopi (*Coffea* sp.), haramay (*Boehmeria nivea*) dan tidak diperbolehkan menanam palawija kembali di kawasan hutan. Namun kegiatan tersebut banyak mengalami hambatan sehingga tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana, sehingga diperlukan suatu kajian mengenai strategi rehabilitasi hutan lindung di Kabupaten Garut berdasarkan pendapat para *stakeholders* yang berkepentingan.

Permasalahan yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung diidentifikasi kemudian dikelompokkan ke dalam empat faktor utama yaitu: perilaku masyarakat, perilaku pengusaha, kebijakan pemerintah, dan jenis komoditi yang dikembangkan. Aktor yang berperan terdiri dari Dinas Kehutanan Kabupaten, BKSDA (Balai Konservasi Sumberdaya Alam), Perum Perhutani, LSM, Pengusaha dan Masyarakat. Sedangkan tujuan dibagi tiga yaitu: peningkatan pendapatan masyarakat, kelestarian hutan lindung, dan perubahan pola pikir dari masyarakat,

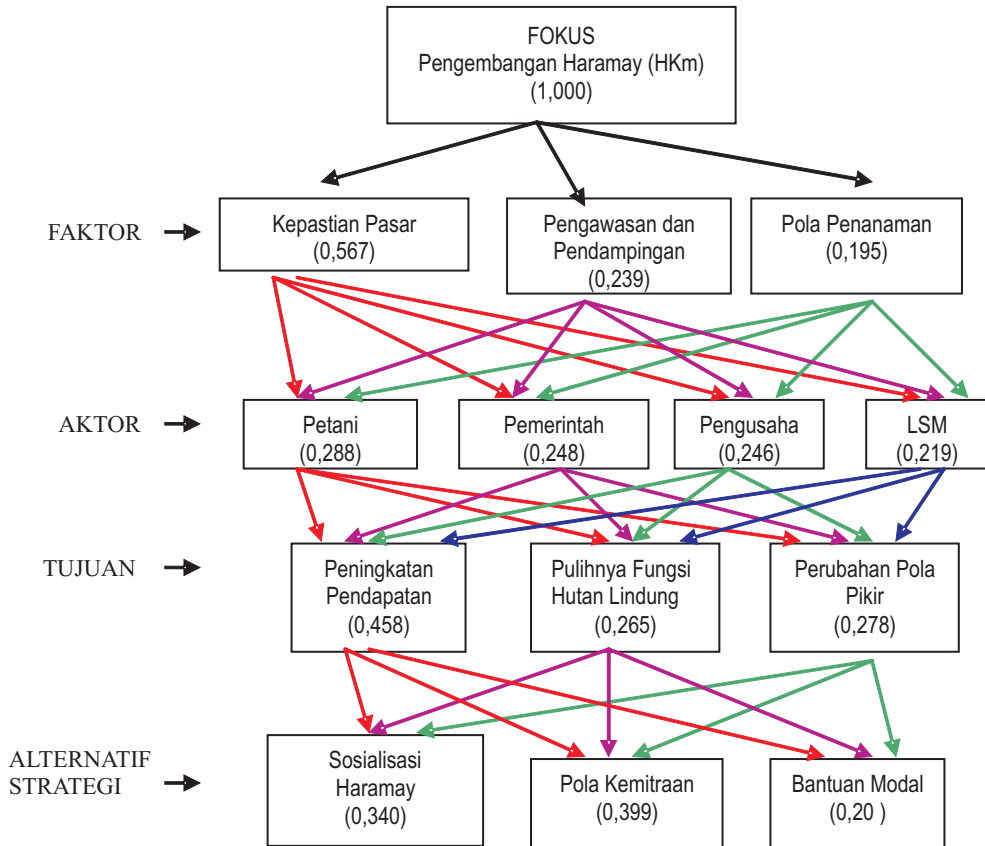
sehingga strategi yang mungkin dilakukan untuk merehabilitasi hutan lindung ada tiga yaitu: pengembangan haramay (HKM), penegakan hukum, dan penghijauan berkelanjutan, seperti tercantum pada Gambar 3. Jenis komoditi yang dipilih adalah haramay hal ini berdasarkan hasil diskusi dengan *stakeholder* yang tergabung dalam POKJA PHBM di tingkat Kabupaten Garut. Selain itu jenis ini menjadi perhatian nasional, karena rencana ke depan di Kabupaten Garut akan dibangun pabrik pengolahan batang haramay menjadi *stapel fiber*.

Hasil analisis menggunakan AHP menunjukkan strategi yang mempunyai skor terbesar sebagai strategi utama dalam kegiatan rehabilitasi hutan lindung di Kabupaten Garut adalah pengembangan haramay dengan pola HKM (0,456). Hal ini dimungkinkan karena tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta cocok ditanam di kawasan hutan lindung sehingga pelibatan masyarakat masih ada. Strategi yang kedua adalah penegakan hukum (0,305) dimana pada sistem ini pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung rendah/tidak ada, sehingga aturan hukum benar-benar dijalankan dengan pemberlakuan sanksi bagi yang melanggar oleh pihak-pihak yang berwenang. Strategi ketiga adalah penghijauan berkelanjutan (0,364), strategi ini adalah suatu kegiatan rehabilitasi yang dilakukan dengan jenis tanaman sesuai keinginan masyarakat dalam pemilihan jenisnya.



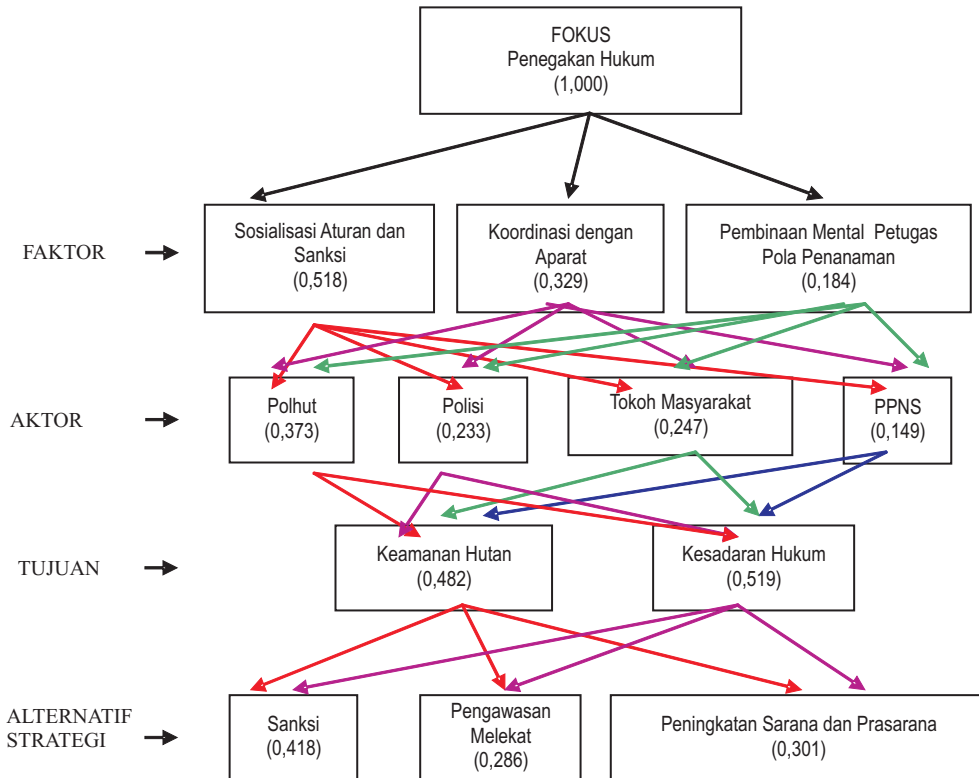
Gambar 3. Hirarki Pertama: Strategi Rehabilitasi Hutan Lindung di Kabupaten Garut

Selanjutnya berdasarkan alternatif strategi pada hirarki yang pertama dilakukan proses perhitungan untuk memperoleh bobot prioritas keseluruhan berkenaan dengan strategi rehabilitasi hutan lindung dengan mengagregasi bobot kepentingan relatif dan hirarki yang telah ditentukan. Hasil analisis menghasilkan prioritas strategi rehabilitasi hutan lindung di Kabupaten Garut, dengan fokus utama akan dilakukan pengembangan haramay (*Boehmeria nivea*) maka strategi yang dapat dilakukan pertama adalah pola kemitraan (0,399), sosialisasi haramay (0,340) dan bantuan modal (0,20) seperti ditunjukkan Gambar 4.



Gambar 4. Hirarki Kedua: Pengembangan Haramay (HKm) sebagai Alternatif Strategi Rehabilitasi Hutan Lindung di Garut

Selanjutnya apabila fokus penegakan hukum yang akan diterapkan untuk merehabilitasi hutan lindung maka strategi utama yang dapat dilakukan adalah pemberian sanksi (0,418) kepada seluruh elemen yang melakukan pelanggaran baik itu masyarakat maupun aparat pemerintah, strategi yang kedua adalah peningkatan sarana dan prasarana (0,301) bagi para petugas yang berhubungan dengan pengawasan hutan lindung di lapangan, dan strategi yang ketiga adalah pengawasan melekat (0,286) yang dilakukan kepada para petugas juga kepada masyarakat, seperti ditunjukkan Gambar 5.

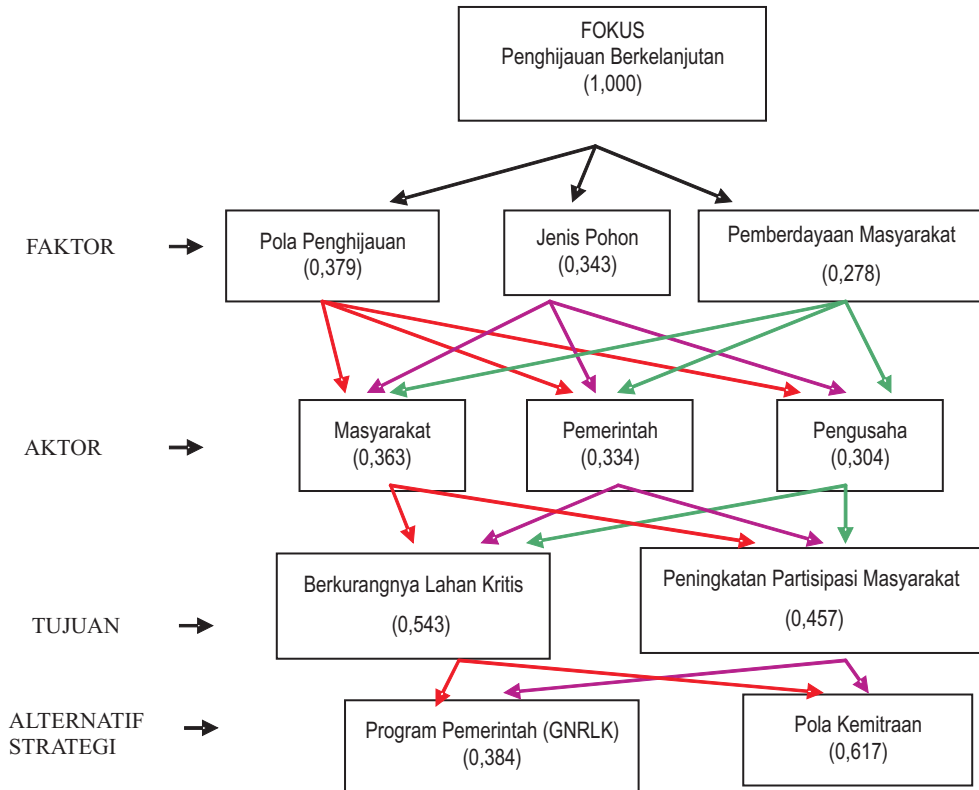


Gambar 5. Hirarki Kedua: Penegakan Hukum sebagai Alternatif Strategi Rehabilitasi Hutan Lindung di Kabupaten Garut.

Sedangkan jika fokus penghijauan yang berkelanjutan yang akan diterapkan untuk melakukan rehabilitasi di hutan lindung maka strategi yang dapat diterapkan diantaranya adalah pola kemitraan (0,617) dan Program Pemerintah (GNRLK) (0,384) seperti diperlihatkan pada Gambar 6.

Tahapan-tahapan dalam penentuan strategi harus dilakukan terutama tahap pertama karena sangat menentukan keberhasilan suatu program. Selain itu tahap pertama ini menentukan tahap berikutnya yang mungkin bisa berlainan tergantung sasaran, pelaksanaan, dan waktu program.

Dari hasil analisis menggunakan AHP, apabila rehabilitasi hutan lindung dilakukan dengan melibatkan petani maka strategi utama adalah pola kemitraan dengan lembaga ekonomi (perusahaan), swadaya, dan pemerintah baik pada fokus pengembangan haramay maupun penghijauan berkelanjutan sehingga adanya kepastian mengenai harga jual dan bahan baku. Juga ada kepastian bagi pemerintah dimana jika hutan lindung ditanami dengan tanaman yang dapat merehabilitasi lahan (sehingga kerusakan dapat dikurangi) merupakan langkah awal yang penting. Langkah yang diperlukan selanjutnya adalah sosialisasi mengenai tanaman tersebut secara kontinyu sehingga informasi yang diterima oleh petani komprehensif (tidak sepotong-sepotong).



Gambar 6. Hierarki Kedua: Penghijauan Berkelanjutan sebagai Alternatif Strategi Rehabilitasi Hutan Lindung di Kabupaten Garut

Langkah terakhir adalah bantuan modal baik itu melalui program pemerintah ataupun swasta lainnya. Memang seperti diketahui bahwa petani yang melakukan perambahan di hutan lindung pada umumnya adalah petani miskin yang tidak memiliki modal dan lahan, sehingga lapangan pekerjaan yang tersedia hanya sebagai petani penggarap di lahan hutan lindung. Dengan demikian, bantuan modal sangat diperlukan bagi keberlangsungan kegiatan usaha.

Sedangkan jika fokus penegakan hukum yang akan diterapkan maka lebih dititikberatkan pada penerapan aturan yang berlaku sehingga pelibatan masyarakat semakin kecil. Oleh karena itu strategi yang dihasilkan menggunakan AHP adalah pemberian sanksi kepada yang melanggar peraturan. Diharapkan pada situasi ini semua pihak mempunyai posisi dan status yang sama di mata hukum sehingga keadilan dirasakan oleh semua pihak, untuk menunjang hal ini diperlukan peningkatan sarana dan prasarana bagi petugas terkait dan pengawasan yang melekat bagi petugas pelaksana dilapangan sehingga pengawasan dapat berjalan dengan lancar.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Kondisi hutan lindung di Kabupaten Garut menurut pendapat *stakeholders* sudah mengalami kerusakan dan mengalami tekanan yang cukup tinggi sehingga menimbulkan kerawanan kelestarian. Salah satunya disebabkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap hutan lindung. Hal ini memerlukan perhatian dan peranan semua pihak untuk menanganinya. Sosialisasi mengenai program reboisasi/konservasi serta penerapan sanksi bagi yang merusak hutan lindung masih belum berjalan.
2. Urutan prioritas strategi pelaksanaan rehabilitasi hutan lindung di Kabupaten Garut adalah pengembangan haramay (0,456), penegakan hukum (0,305), dan penghijauan berkelanjutan (0,364). Strategi dalam pengembangan haramay dapat dilakukan melalui: pola kemitraan (0,399), sosialisasi haramay (0,340), dan bantuan modal (0,20). Strategi penegakan hukum dapat dilakukan melalui: pemberian sanksi (0,418), peningkatan sarana dan prasarana (0,301), dan pengawasan melekat (0,286), dan strategi penghijauan berkelanjutan dapat dilakukan melalui: pola kemitraan (0,617) dan program pemerintah/GNRLK (0,384).

### B. Saran

Strategi rehabilitasi lahan melalui program pengembangan haramay dapat dilanjutkan mengingat animo masyarakat masih sangat tinggi. Namun demikian, untuk keberhasilan program ini perlu didukung oleh perencanaan yang matang dan terpadu serta melibatkan berbagai *stakeholders* secara aktif sesuai dengan peranannya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Saaty, TL. 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin. Terjemahan. LPPM. Jakarta.
- Anonim. 2001. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut. Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bandung.
- Anonim. 2004. Kabupaten Garut dalam Angka. BPS Kabupaten Garut. Garut.
- Anonim. 2005. Kabupaten Garut dalam Angka. BPS Kabupaten Garut. Garut.
- Ginoga K, Mega Lugina, Deden Djaenudin dan Y.C. Wulan. 2005. Kontrovesi Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung (Controversial Policy of Protection Forest Management). Prosiding Seminar Penelitian Sosial Ekonomi Mendukung Kebijakan Pembangunan Kehutanan. Bogor 13 September 2005. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Departemen Kehutanan. Bogor.
- Ramdan, H. dan Yayan Herdiana. 2003. Penetapan Prioritas Pelaksanaan Sepuluh Urusan Kehutanan Pada Tingkat Kabupaten di DAS Cimanuk Menggunakan Metode AHP. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Otonomi Daerah. Perspektif Kebijakan dan Valuasi Ekonomi. Alqaprint Jatinangor.